

RESIKO/PERMASALAHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA



**Disampaikan dalam Kegiatan Workshop Reviu Penyerapan
Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
di Jakarta, April 2016.**

**Mohamad Hardi, Ak. MProf Acc, CA.
Inspektur I Kemenristekdikti**

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE

TRANSPARANSI

AKUNTABILITAS

RESPONSIBILITY

INDEPENDENSI

FAIRNESS

Korupsi Pengadaan

- Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (*Kaufmann, World Bank 2006*)

Korupsi seperti penyakit menular yang menjangar pelan, tetapi mematikan dan menciptakan kerusakan sangat luas dimasyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran hak asasi manusia, juga mendistorsi perekonomian

Kofi Annan, saat menjabat Sekjen PBB



**BOCOR LAGI,
BOCOOOR
LAGI ...!**

**30%-50%
DANA
PENGADAAN
BARANG
APBN/D**

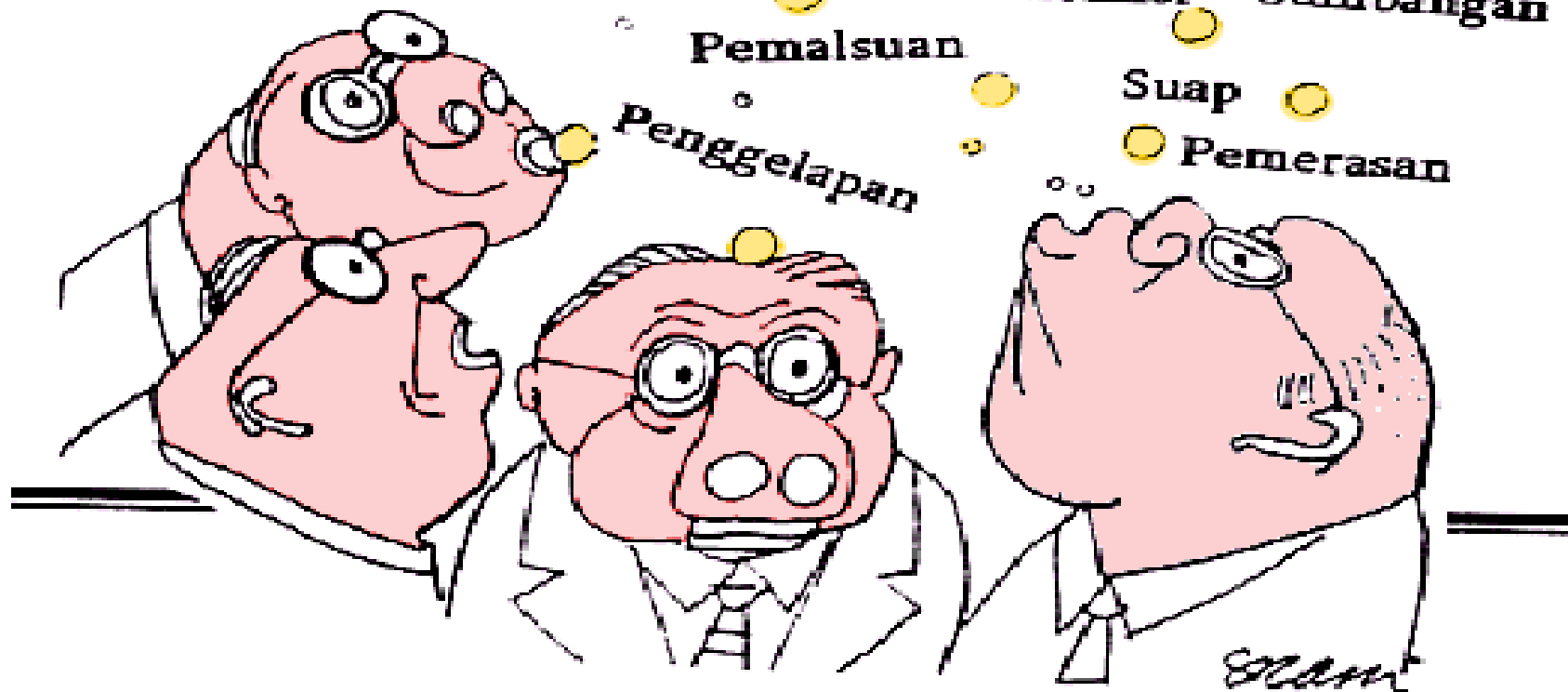
Pemalsuan

Komisi Sumbangan

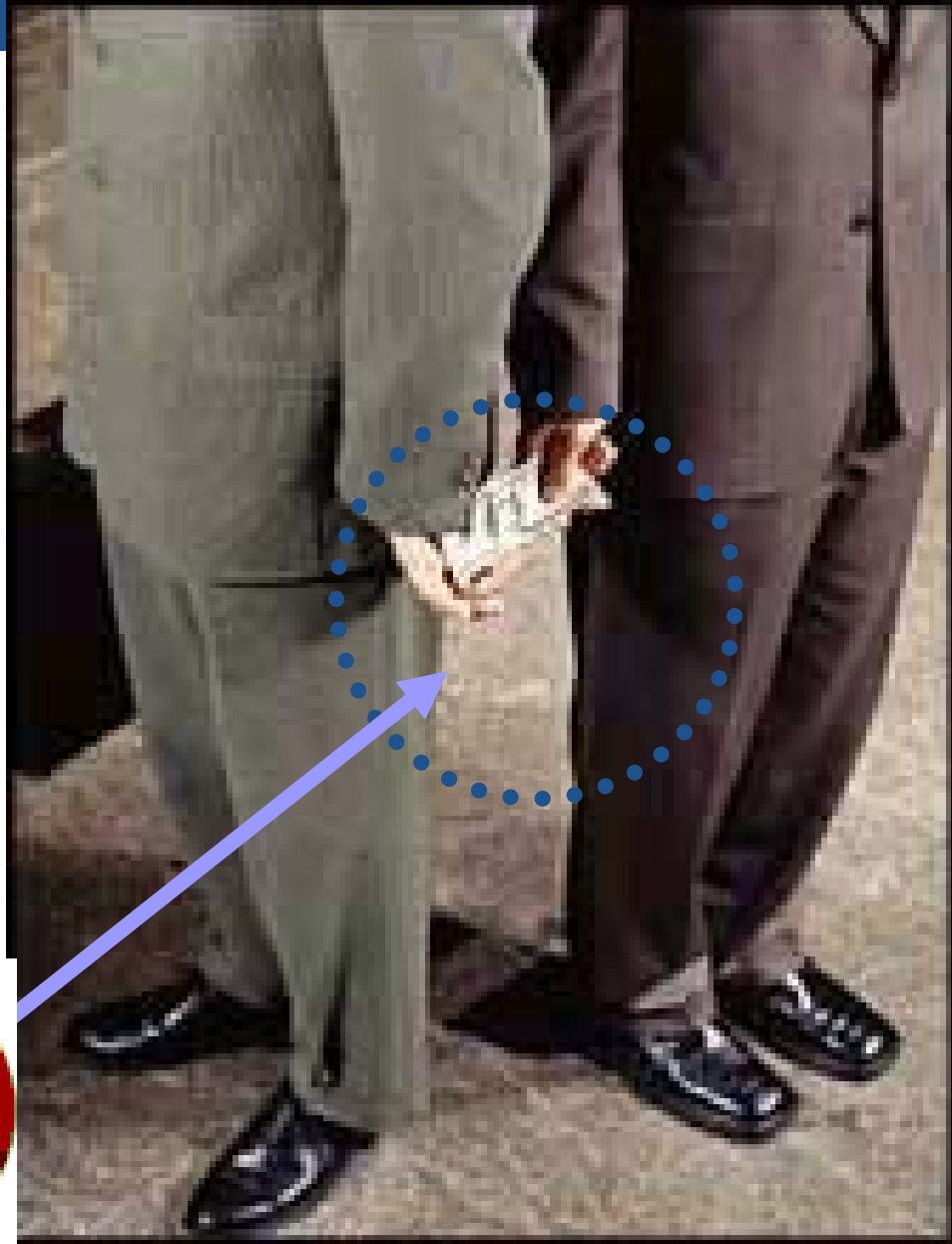
Suap

Penggelapan

Pemerasan



Praktek ini
yang sering
terjadi !

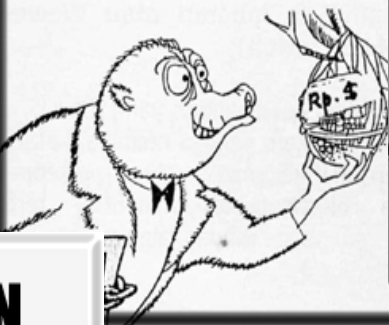


Sebab terjadinya KKN pada
proses pengadaan pemerintah
akibat dari terjadinya 10 Tindak Korupsi

**PENYUAPAN
(BRIBERY)**



**PENGGELAPAN
EMBLEZZEMEN**



**PEMALSUAN
(FRAUD)**



**PENYALAHGUNAAN
WEWENANG (Abuse
of Discretion)**



**USAHA SENDIRI
(INTERNAL TRADING)**



**PEMERASAN
(EXTORTION)**



NEPOTISME



**PILIH KASIH
(FAVORITISM)**



**MENERIMA KOMISI
(COMMISSION)**



**SUMBANGAN
ILEGAL
(ILLEGAL
CONTRIBUTION)**



Korupsi Pengadaan

Kasus korupsi pengadaan BJ sebanyak 38% dari kasus yang ditangani oleh KPK (Sumber : *Lap Tah KPK 2012*)



Sumber : Presentasi UKP4 pada Sosialisasi Eprocurement pada Pemda DKI

PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA

Permasalahan dalam Pengadaan

- **Perencanaan**
- **Pemilihan**
- **Pelaksanaan Kontrak**
- **Serah Terima**



Permasalahan Tahap Perencanaan ^{1/3}

▪ Rencana Umum Pengadaan (RUP)

- Rencana pengadaan tidak berdasarkan kebutuhan
 - Rencana pengadaan tidak diumumkan secara terbuka pada awal tahun anggaran.
 - Rencana pengadaan tidak disusun secara sistematis terhadap; apa (spesifikasi dan kualitas), kapan (jadwal, waktu diterima), bagaimana (sumber, sistem), berapa (kuantitas) dan biaya.
-

Permasalahan Tahap Perencanaan ^{2/3}

- **Kesalahan dalam Penyusunan Rencana Teknis :**
 - Menyusun Spesifikasi:
 - Mengarah kepada produk tertentu
 - Spesifikasi terlalu tinggi (*over specification*)
 - Menyusun HPS:
 - Penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan
 - Nilai HPS digelembungkan (*mark-up*)
 - Nilai HPS diatur oleh pelaku usaha
 - Menyusun Rancangan Kontrak:
 - Rancangan kontrak belum dibuat saat pelelangan
 - Penetapan jenis kontrak tidak sesuai
 - Tata cara pembayaran tidak jelas
-

Permasalahan Tahap Perencanaan ^{3/3}

- Kesalahan dalam Penyusunan Rencana Pemilihan
 - Menetapkan syarat penyedia yang sudah diarahkan kepada penyedia tertentu
 - Menyusun jadwal yang terlalu cepat, sehingga penyedia yang sudah dipersiapkan yang dapat menyampaikan penawaran
 - Pembatasan informasi, sehingga penyedia tertentu saja yang mendapatkan informasi lengkap
-

Permasalahan Tahap Pemilihan

- Pengumuman Pelelangan (semu atau fiktif, isi tidak lengkap, waktu pengumuman singkat)
 - Pokja tidak menguasai substansi teknis dan informasi penting yang akan dijelaskan dalam aanwijzing
 - Tidak melakukan koreksi aritmatik untuk kontrak harga satuan,
 - Menggugurkan penawaran <80% HPS
 - Tidak melakukan klarifikasi dalam proses evaluasi
 - Tidak menjawab sanggah
-

Permasalahan Pelaksanaan Kontrak^{1/2}

- Pembayaran uang muka, tetapi penyedia tidak menyampaikan jaminan uang muka
 - Penyerahan pekerjaan utama kepada perusahaan lain/sub kontraktor
 - Pengawas atau pemeriksa pekerjaan membuat laporan yang tidak benar atau memalsukan laporan untuk menutupi kondisi yang tidak benar
 - Perpanjangan masa waktu kontrak
 - Tata cara pembayaran tidak sesuai dengan kontrak
-

Permasalahan Pelaksanaan Kontrak ^{2/2}

- Addendum kontrak lumpsum
 - Pembayaran melebihi progres, atau pembayaran 100% untuk pekerjaan yang belum selesai
 - Tidak mengenakan sanksi kepada penyedia yang terlambat
 - Penyesuaian Harga
 - Pemutusan Kontrak
-

Permasalahan Serah Terima

- Pekerjaan fisik belum selesai 100%
 - Kualitas barang/jasa tidak sesuai standar dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak
 - Perubahan spesifikasi dan volume yang diubah berdasarkan permintaan penyedia atau kemauan bersama
 - Pekerjaan tidak dilaksanakan atau hanya sebagian yang dikerjakan (fiktif), namun telah memperoleh bayaran penuh.
 - Penundaan atau memperlambat pembayaran oleh PPK
-

Solusi Mengatasi Tindak Pelanggaran Pengadaan

1. Patuh pada ketentuan dan peraturan pengadaan serta taat azas, norma dan etika pengadaan.
2. Melaksanakan sistem dan prinsip pengadaan secara tepat dan dengan sebaik-baiknya.
3. Organisasi, birokrasi dan manajemen pengadaan yang baik.
4. Profesionalisme dan kompetensi dari pejabat dan pelaksana pengadaan.
5. Keteladanan dari pimpinan tertinggi
6. Penerapan sanksi yang tegas dan pengendalian serta pengawasan yang ketat

Solusi Mengatasi Tindak Pelanggaran Pengadaan

7. Meningkatkan transparansi dalam proses pelaksanaan pengadaan
 8. Melaksanakan proses pengadaan secara elektronik (e-Procurement)
 9. Memberikan akses ke publik dalam memperoleh informasi tentang proses pelaksanaan kegiatan pengadaan
 10. Menghindari belanja mendesak di akhir tahun anggaran
 11. Reviu Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa sejak Perencanaan oleh SPI;
-

TERIMA KASIH

